

Pendampingan

Implementasi Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)

Dinas Lingkungan Hidup
(DLH)





Latar Belakang

Permasalahan saat ini yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang diantaranya terbatasnya anggaran dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, aturan keuangan daerah yang menjadikan hambatan dalam kelancaran kegiatan pelayanan publik, sulitnya mengukur kinerja publik sebagai bentuk akuntabilitas instansi, dan alur birokrasi yang terlalu panjang.

Pendekatan anggaran berbasis kinerja ini sangat dibutuhkan oleh UPT/D yang khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mewirausahaakan pemerintah (enterprising goverment) seperti yang telah diatur didalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selain itu, pada pasal 68 dan 69 undang-undang nomer 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

UPT/D pengelolaan sampah di bawah dinas lingkungan hidup dituntut untuk dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia, sarana prasarana

yang memadai, prosedur kerja dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan sampah. Di sisi lain pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi UPT/D pengelolaan sampah untuk berupaya dalam peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola UPT/D pengelolaan sampah secara entrepreneur bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPT/D pengelolaan sampah perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

Persoalan sampah merupakan persoalan yang selalu ada selama berlangsungnya kehidupan. Sampah merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, baik itu sampah domestik, sampah industri, sampah spesifik, sampah medis maupun sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan sampah rumah tangga sebesar 70% dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% sampai dengan tahun 2025. Komitmen ini menjadi dasar peningkatan kualitas pengelolaan persampahan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan peningkatan kualitas dalam pengelolaan sampah pada UPT/D Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Dalam melaksanakan penerapan PPK BLUD di UPT/D banyak mengalami hambatan dalam akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban setelah menerapkan BLUD, antara lain sebagai berikut:

- 1.** Penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
- 2.** Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan untuk penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan BLUD
- 3.** Penyusunan laporan keuangan BLUD

Solusi Permasalahan BLUD kami memiliki layanan berupa:



**Dari permasalahan yang ada
perlu adanya peningkatan
kapasitas SDM agar Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD
berjalan dengan baik.**

Pendampingan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

UPT DLH yang telah menerapkan BLUD memerlukan pendampingan secara intensif untuk melaksanakan PPK BLUD. Dalam hal ini kami memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dan memahami implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam persiapan dan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Pendampingan ini bertujuan agar UPT DLH mampu menyajikan Laporan Keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta dapat diterima oleh BPK.



Rincian Output Pendampingan

Pendampingan

Output

**Pendampingan penyusunan
rencana bisnis & anggaran**

Dokumen RBA

**Pendampingan Penerimaan,
Pengeluaran, dan Pembiayaan
BLUD**

**Laporan Pertanggung
jawaban Penerimaan,
Pengeluaran dan
Pembiayaan BLUD**

**Pendampingan penyusunan
laporan keuangan BLUD**

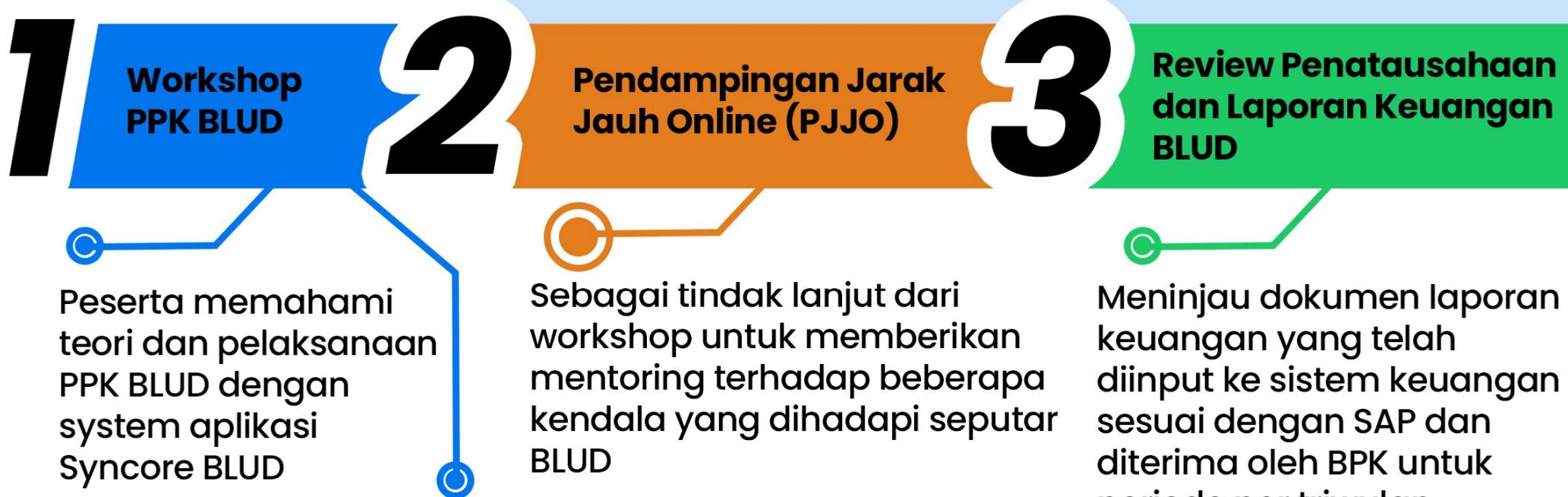
**Laporan keuangan sesuai
PSAP13**



Metode Layanan

Metode pendampingan Periode 1 tahun

Financial Services Consultant



Modul	Hari	PIC/Mentor
Pengantar BLUD & Tata kelola BLUD	Hari ke-1	
Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA)	Hari ke-2	Tenaga Ahli dan Konsultan BLUD
Alur Penerimaan & Pengeluaran		
Penatausahaan Pejabat Keuangan	Hari ke-3	
Penyusunan Laporan Keuangan		

Fasilitas Pendampingan

1. Materi PPK BLUD
2. Trial dan praktik sistem Syncore BLUD
3. Free sistem Syncore BLUD dan konsultasi dengan Financial Services Consultant (FSC)
4. Review penatausahaan per triwulan dan laporan keuangan semesteran maupun tahunan

Pendampingan PPK BLUD dengan Financial Services Consultant (FSC)



o Syncore BLUD hadir dalam memberikan layanan unggulan yang lebih intensif dengan menyediakan tim khusus dalam pendampingan PPK BLUD melalui Financial Services Consultant (FSC).

o Financial Services Consultant (FSC) berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan seperti pada pemahaman BLUD, kendala sistem aplikasi serta review laporan BLUD secara efektif dan akuntabel. FSC memberikan layanan berupa:

Layanan Financial Services Consultant (FSC)

1

Inbond: tanya jawab seputar permasalahan blud

2

Outbond: review inputan system

3

Review penatausahaan keuangan (triwulan), laporan keuangan (semesteran dan tahunan)

Untuk memberikan layanan prima, FSC memfasilitasi melalui:

1. Voice: telepon

2. Typing: whatsapp dan email

3. Meeting: zoom meeting

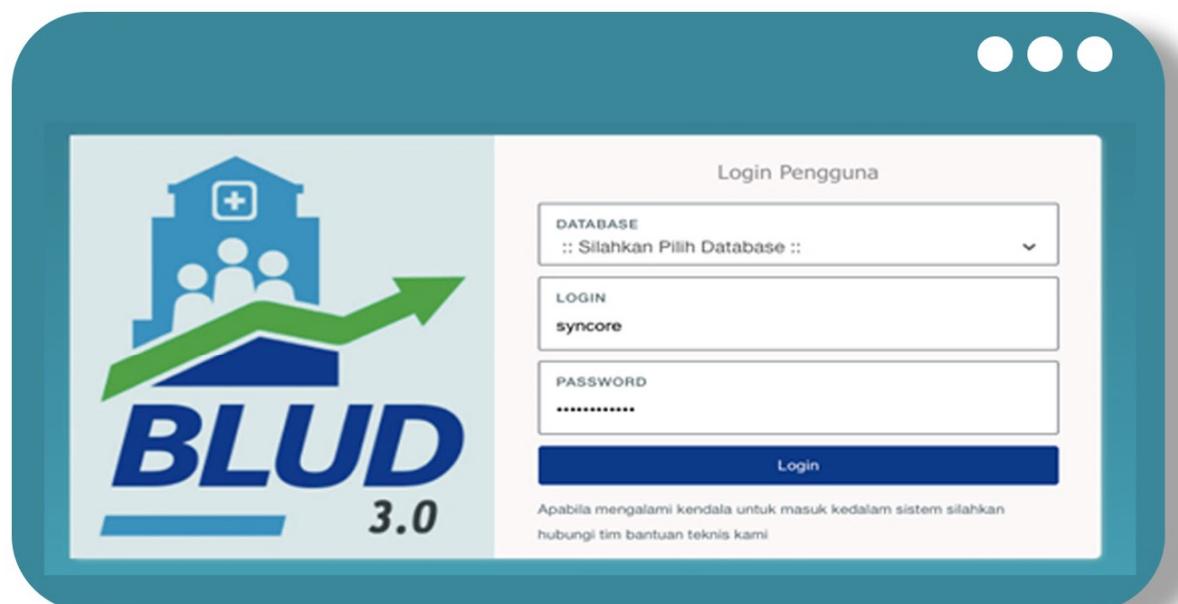
Digitalisasi Pengelolaan Keuangan



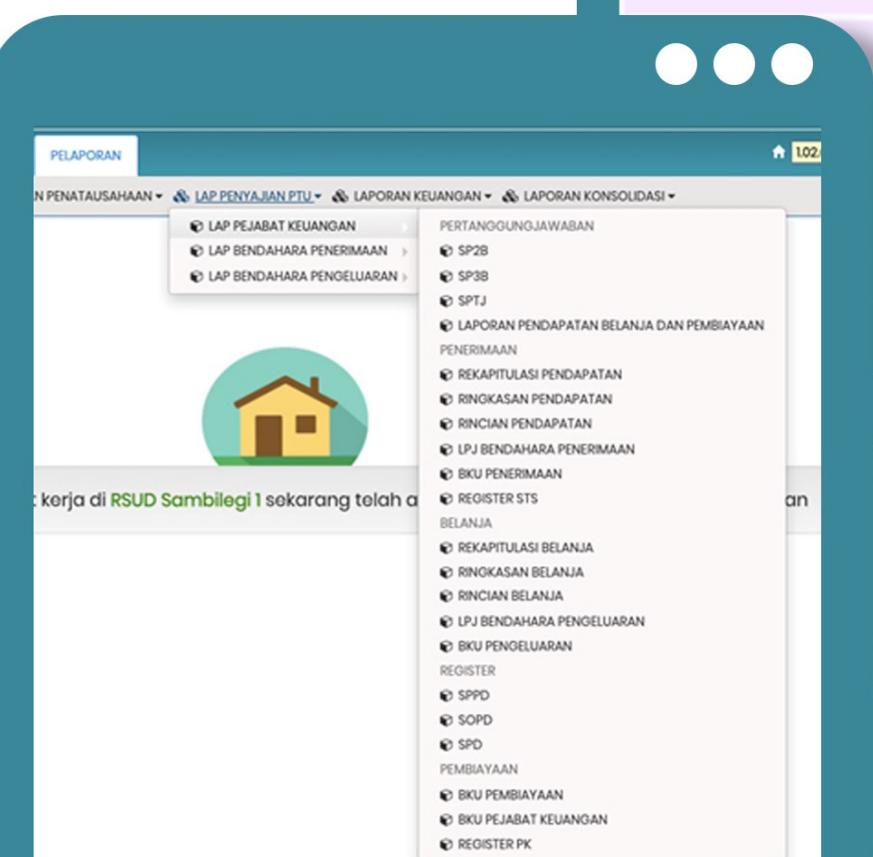
Menggunakan Software BLUD Syncore Sistem (Alur Sistem)

Syncore hadir dengan software Laporan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berbasis web (software) online untuk menunjang kinerja DLH agar efisien dan efektif dalam membuat laporan keuangan. Berikut ini adalah tampilan dari sistem Syncore BLUD:

Gambar 1
Tampilan User Login Sistem Syncore BLUD



Gambar 2
Tampilan dashboard user Pejabat Keuangan



Gambar 3
Tampilan Laporan Penyajian Penatausahaan Keuangan

Indikator Kesuksesan Pendampingan PPK BLUD

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD		
INDIKATOR	TARGET	METODE POTENSIAL
Partisipasi Peserta Workshop PPK BLUD	Peserta workshop memiliki komitmen untuk mengikuti workshop dari awal sampai akhir sesuai dengan program dan jadwal yang telah direncanakan dan memiliki komitmen meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban BLUD di instansi bekerja.	Kuesioner, Absensi, dan Pengamatan
Jadwal Pelaksanaan Workshop	Workshop PPK BLUD dilaksanakan selama 3 hari sesuai jadwal	Pelaksanaan workshop sesuai jadwal
Anggaran Workshop PPK BLUD	Anggaran Workshop disesuaikan dengan penawaran yang ada	Laporan
Materi Workshop PPK BLUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar BLUD & Tata Kelola BLUD. 2. Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA). 3. Alur Penerimaan dan Pengeluaran. 4. Penatausahaan Pejabat Keuangan 5. Penyusunan Laporan Keuangan. 	Ceramah, Tanya Jawab dan Simulasi menggunakan sistem Syncore BLUD
Jumlah penerima manfaat dari pelaksanaan Workshop PPK BLUD	Peserta menganggap workshop PPK BLUD bermanfaat bagi pelaksanaan PPK BLUD di instansi mereka	Kuesioner

Indikator Kesuksesan Pendampingan PPK BLUD

PJJO Pola Pengelolaan Keuangan BLUD		
INDIKATOR	TARGET	METODE POTENSIAL
Jumlah Klien aktif yang melakukan pendampingan jarak jauh online	Klien aktif melakukan pendampingan PPK BLUD meliputi RBA, Penatausahaan keuangan hingga Laporan Keuangan	Pendampingan Jarak Jauh Online menggunakan aplikasi digital
Jumlah Klien Aktif yang dapat menyusun laporan anggaran, penatausahaan keuangan BLUD hingga laporan keuangan BLUD menggunakan system aplikasi Syncore BLUD	Klien aktif yang melaporkan laporan anggaran, penatausahaan keuangan BLUD hingga laporan keuangan BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku	Review laporan penatausahaan keuangan triwulan dan review laporan keuangan semesteran dan tahunan
Jumlah penerima manfaat dari pelaksanaan Pendampingan PPK BLUD	Peserta menganggap pendampingan PPK BLUD bermanfaat bagi pelaksanaan PPK BLUD di instansi mereka	Kuesioner

Layanan Pelatihan dan Pendampingan **Syncore BLUD Lainnya**

Untuk menunjang terlaksananya implementasi PPK BLUD sesuai dengan peraturan berlaku, Syncore BLUD memberikan layanan berupa:

**Pelatihan/Pendampingan
Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah**

1

**Pelatihan/Pendampingan
Perhitungan Unit Cost
sebagai Dasar Penyusunan
Pola Tarif BLUD**

2

**Pelatihan/Pendampingan
Remunerasi**

3

**Pelatihan/Pendampingan
Pembentukan dan
Penguatan SPI BLUD**

4

**Pelatihan/Pendampingan
Penyusunan laporan
keuangan bagi tenaga
akuntansi**

5

**Pendampingan Persiapan
Penerapan BLUD**

6

**Penyusunan Dokumen
Adminitratif Penerapan
BLUD**

7

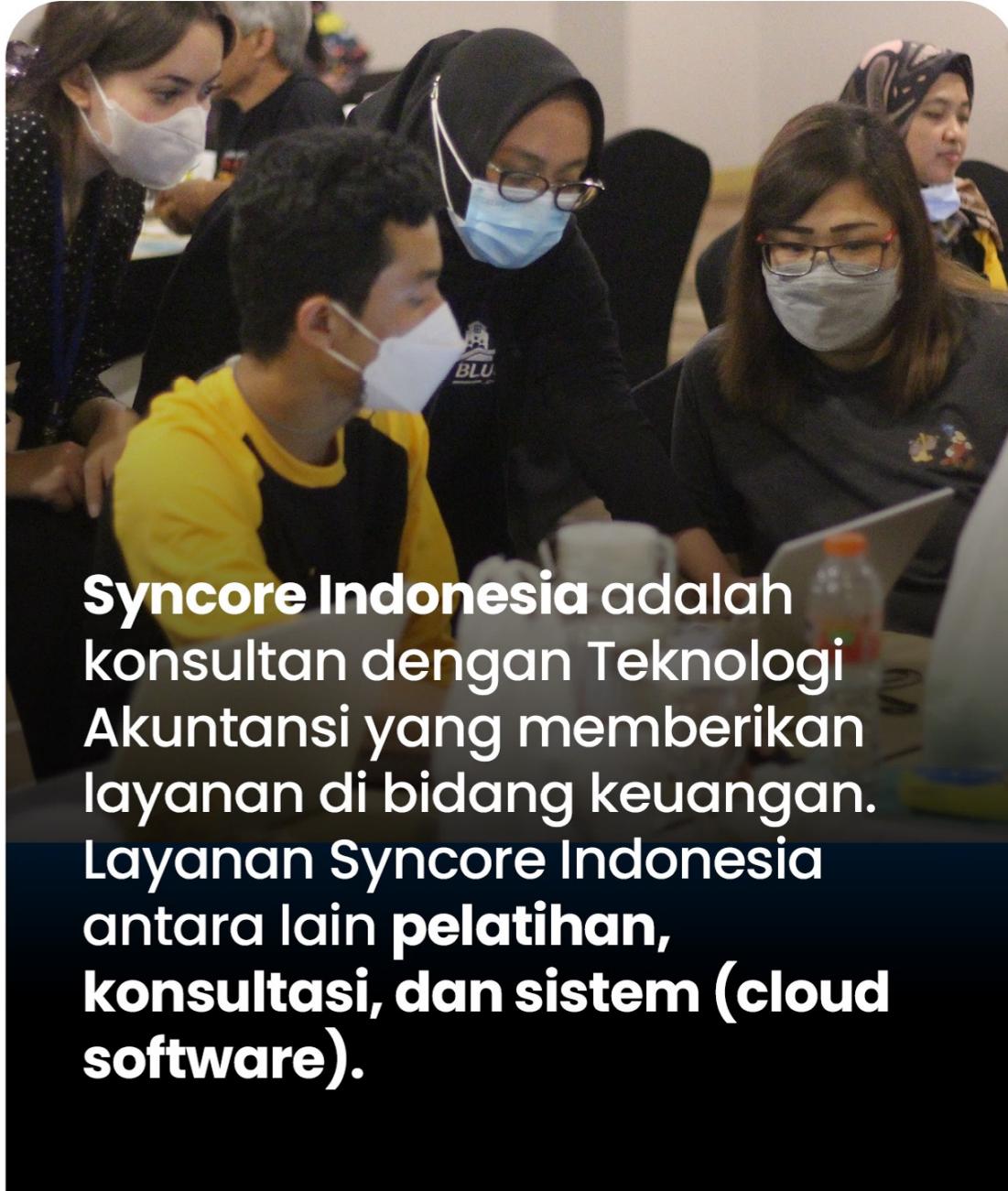
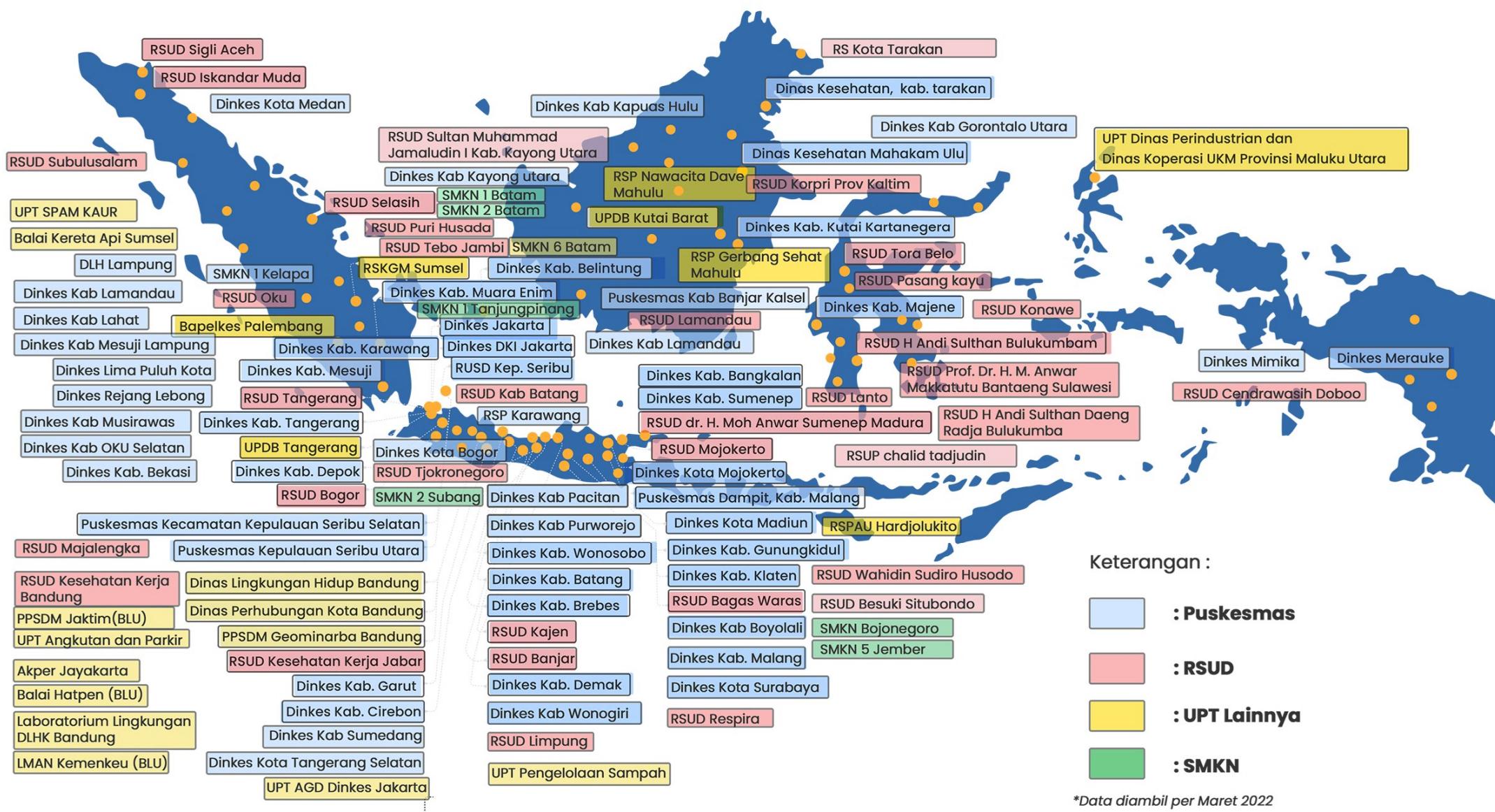
**Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah**

8

Profile **BLUD**

Peta Mitra

Syncore BLUD



Syncore Indonesia adalah konsultan dengan Teknologi Akuntansi yang memberikan layanan di bidang keuangan. Layanan Syncore Indonesia antara lain **pelatihan, konsultasi, dan sistem (cloud software)**.



Syncore Indonesia berdiri sejak 9 Juli 2010 yang memberikan jasa konsultan manajemen bisnis dan keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Syncore Indonesia kini memberikan layanan di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD). Didukung dengan tenaga profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, kami telah mendampingi lebih dari 1.100 instansi, baik Badan Layanan Umum maupun Badan Layanan Umum Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Narasumber



Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M, CAAT

Bertindak selaku konsultan teknologi informasi, tenaga ahli serta **narasumber BLUD yang berpengalaman dalam melakukan lebih dari 1000 pelatihan dan pendampingan**. Beliau juga terlibat dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

Partner Narasumber Dan Praktisi



Dr Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ak., CA

Dosen Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta, mantan
auditor senior,
berpengalaman lebih 300
(tiga ratus) pelatihan dan
pendampingan.

Andri Yandono, SE, MM

Dewan pengawas RSUD
Kota Yogyakarta dan
RSUD Panembahan
Senopati Bantul, Kepala
Keuangan RSUD
Panembahan Senopati
Bantul, tim penilai BLUD
Kabupaten Bantul.

Soni Haksomo, SE, M.Si

Kasubag keuangan
RSUD Kota Yogyakarta

- **Tim perndamping BLUD Syncore**

Partner

PARTNER KAMI



Dinkes Kabupaten Lahat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara



Dinas Kesehatan
Kab. Limapuluh Kota



Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau



Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo



DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN



PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS
KOTA TARAKAN



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOGIRI



UNIT PELAYANAN
AMBULANS GAWAT DARURAT
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA



ppsdm
GEOMINERBA



Partner



Partner

PARTNER KAMI



Dinas Kesehatan Kabupaten
Kutai Kartanegara



DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KOTA SAMARINDA



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KULON PROGO



DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KESEHATAN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUMENEP



DINKES
KOTA SERANG



Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Marsidi Judono



DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAYONG UTARA



RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA
KABUPATEN BULUKUMBA



RSUD MUARADUA
OKUSELATAN



RSUD CENDRAWASIH
KEPULAUAN ARU

Partner

